

KEMISKINAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KAPABILITAS AMARTYA SEN

Anggun Laksmi Dew¹; Deky Aji Suseno²

Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Ekonomi Pembangunan,

Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia^{1,2}

Email : anggunlaksmi01@students.unnes.ac.id¹; dekyajisuseno@gmail.com²

ABSTRAK

Masalah kemiskinan di Indonesia tetap menjadi tantangan utama meskipun pembangunan fisik terus dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kapasitas daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendidikan melalui Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) terhadap tingkat kemiskinan. Selain itu, penelitian ini menguji peran infrastruktur dasar (Listrik, Internet, Sanitasi, Kesehatan (Puskesmas)) serta bantuan pemerintah (Rasio KPM Bansos Pangan dan Rasio Belanja Bantuan Sosial) sebagai variabel perantara dalam kerangka Teori Kapabilitas Amartya Sen. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan panel data dari 34 provinsi di Indonesia periode 2018–2024. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) yang dipilih karena kemampuannya dalam menguji hubungan antarvariabel kompleks secara simultan, terutama pada model yang melibatkan variabel mediator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Temuan lain membuktikan bahwa variabel Akses Listrik, Akses Sanitasi Layak, Akses Internet, dan Akses Kesehatan (Puskesmas) memiliki pengaruh terhadap kemiskinan. Demikian pula, variabel Rasio KPM Bansos Pangan dan Rasio Belanja Bantuan Sosial terbukti berpengaruh dalam mempengaruhi angka kemiskinan di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa kapasitas fiskal daerah dan kualitas sumber daya manusia harus diarahkan secara tepat pada penyediaan fasilitas publik serta jaring pengaman sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara efektif.

Kata Kunci : Kemiskinan; Teori Kapabilitas; Infrastruktur; Bantuan Sosial; SEM-PLS

ABSTRACT

Poverty in Indonesia remains a major challenge despite continuous physical development. This study aims to analyze the influence of regional fiscal capacity, represented by Local Own-Source Revenue (PAD), and education, represented by Mean Years of Schooling (RLS), on poverty levels. Furthermore, this research examines the role of basic infrastructure, including access to electricity, internet access, proper sanitation, and health access measured by the ratio of community health centers (Puskesmas), as well as government assistance through the ratio of food assistance beneficiaries and the ratio of social assistance expenditure, as mediating variables within the framework of Amartya Sen's Capability Approach. This study employs a quantitative approach using panel data from 34 provinces in Indonesia during the period 2018–2024. Data were analyzed using Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS), which was selected due to its ability to simultaneously test complex relationships among variables, particularly in models involving mediating effects. The results indicate that PAD and RLS influence poverty levels. The findings also show that access to electricity, proper sanitation, internet access, and health access (Puskesmas) affect poverty. Similarly, the ratio of food assistance beneficiaries and the ratio of social assistance expenditure also influence poverty levels in Indonesia. These results suggest that regional fiscal capacity and human resource quality should be directed toward improving public facilities and strengthening social safety nets to enhance public welfare effectively.

Keywords : Poverty; Capability Approach; Infrastructure; Social Assistance; SEM-PLS

PENDAHULUAN

Kemiskinan di Indonesia merepresentasikan sebuah paradoks pembangunan yang multidimensi. Di satu sisi, indikator makroekonomi dan pembangunan infrastruktur fisik menunjukkan kemajuan yang pesat, namun di sisi lain, kerentanan sosial pada lapisan masyarakat bawah masih sangat tinggi. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (2024), meskipun persentase penduduk miskin secara nasional menunjukkan tren penurunan dari 9,78% pada tahun 2019 menjadi 9,36% pada tahun 2023, angka absolut penduduk miskin masih tertahan di atas 25 juta jiwa. Fenomena ini mengindikasikan bahwa penurunan angka persentase statistik tidak serta-merta mencerminkan perbaikan fundamental dalam kualitas hidup masyarakat miskin. Lebih jauh lagi, terdapat kesenjangan yang mencolok antara ketersediaan infrastruktur dengan tingkat kesejahteraan. Bukti empiris, akses terhadap teknologi informasi seperti internet melonjak drastis dari 63,10% pada tahun 2018 menjadi 90,47% pada tahun 2024, dan Akses Listrik rumah tangga telah mendekati angka universal yakni 99,35%. Secara logika pembangunan, ketersediaan Akses Listrik dan Akses Internet yang hampir merata seharusnya mampu memicu produktivitas perekonomian. Namun faktanya kemiskinan ekstrem masih bertahan menunjukkan adanya kegagalan dalam mengubah sumber daya pembangunan menjadi kesejahteraan nyata. Dalam terminologi Amartya Sen, ketersediaan infrastruktur fisik tersebut hanyalah sarana (*commodities*) yang belum tentu bertransformasi menjadi kapabilitas jika individu tidak memiliki kebebasan substantif untuk memanfaatkannya.

Kondisi tersebut menuntut analisis perubahan paradigma, dari pendekatan moneter menuju pendekatan kapabilitas (*Capability Approach*) sebagaimana digagas oleh Amartya Sen. Dalam perspektif ini, kemiskinan dipandang sebagai perampasan kebebasan individu untuk mencapai kehidupan yang bernilai atau perampasan kemampuan. Dalam konteks otonomi daerah, upaya perluasan kapabilitas ini sangat bergantung pada dua pilar fundamental: kapasitas fiskal daerah dan kualitas modal manusia. Pilar pertama adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), kapasitas fiskal yang kuat mencerminkan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai inisiatif pembangunan lokal dan menyediakan layanan publik yang sesuai dengan kebutuhan spesifik wilayahnya. Tanpa dukungan fiskal yang memadai, seperti yang tercermin dalam data belanja pemerintah, intervensi pembangunan menjadi terbatas dan tidak berkelanjutan. Pilar kedua adalah Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) sebagai representasi kualitas modal manusia. Pendidikan berfungsi sebagai faktor konversi yang menentukan seberapa efektif masyarakat dapat mengubah fasilitas yang ada menjadi fungsi ekonomi. UNDP (2020) menegaskan bahwa kemiskinan lebih merupakan akibat dari keterbatasan akses dan kapabilitas, bukan sekadar rendahnya pendapatan. Infrastruktur digital yang canggih tidak akan berdampak optimal jika Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) masyarakat rendah. Tanpa pendidikan yang memadai sebagai

faktor konversi personal, masyarakat tidak akan memiliki kemampuan (*agency*) untuk memanfaatkan teknologi tersebut sebagai alat produksi untuk mencapai fungsi hidup (*functionings*) yang mereka hargai.

Meskipun peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) sangat vital, literatur pembangunan menunjukkan bahwa pengaruh kedua variabel ini terhadap kemiskinan sering kali dimediasi oleh variabel antara, yakni ketersediaan infrastruktur dasar dan efektivitas bantuan sosial. Infrastruktur dasar seperti Akses Kesehatan (Puskesmas), Akses Listrik, Akses Sanitasi Layak, dan Akses Internet bertindak sebagai "sarana kebebasan" yang menghubungkan masyarakat dengan peluang ekonomi. Pramono (2018) menegaskan bahwa akses infrastruktur memiliki peran penting dalam mempercepat penurunan kemiskinan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan efisiensi ekonomi. Sementara itu, bantuan sosial berfungsi sebagai "perlindungan kapabilitas" (*capability protection*) yang menjaga daya beli masyarakat rentan dari guncangan ekonomi. Namun, data menunjukkan adanya volatilitas yang mengkhawatirkan dalam implementasi jaring pengaman sosial ini. Rasio KPM Bansos Pangan mengalami fluktuasi tajam, dari 3,60% pada tahun 2018, anjlok drastis ke 0,54% pada 2019, dan kembali naik ke 3,81% pada 2022. Ketidakstabilan ini, ditambah dengan fluktuasi Rasio Belanja Bantuan Sosial terhadap pagu belanja pemerintah pusat, menunjukkan bahwa dukungan sosial sering kali bersifat reaktif dan belum sepenuhnya terintegrasi secara stabil untuk melindungi fungsi dasar (*functionings*) rumah tangga miskin.

Penelitian terdahulu mengenai determinan kemiskinan di Indonesia masih menunjukkan fragmentasi. Sebagian studi, seperti Christiani & Nainupu (2021), berfokus pada dampak digitalisasi dan Akses Listrik terhadap kualitas hidup. Studi lain, seperti Sumiyarti (2022), menyoroti peran bantuan pangan dalam menjaga pemenuhan kebutuhan dasar. Namun, masih sedikit literatur yang mengintegrasikan aspek kapasitas daerah (Pendapatan Asli Daerah dan Rata Rata Lama Sekolah) bersama dengan infrastruktur dan bantuan sosial dalam satu kerangka model struktural yang komprehensif. Inkonsistensi temuan juga terlihat, di mana peningkatan akses infrastruktur di beberapa wilayah tidak selalu diikuti penurunan kemiskinan jika tidak didukung oleh perlindungan sosial yang tepat sasaran. Hal ini menegaskan perlunya analisis empiris yang lebih terintegrasi untuk membuktikan jalur mana yang paling efektif dalam menurunkan kemiskinan: apakah melalui pembangunan fisik (infrastruktur) atau melalui perlindungan sosial langsung.

Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme pengentasan kemiskinan di Indonesia melalui peran akses infrastruktur dasar dan bantuan sosial. Secara khusus, penelitian ini menguji efektivitas kedua variabel tersebut dalam memediasi pengaruh kapasitas daerah, yang direpresentasikan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS),

terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Penelitian ini juga menghadirkan kebaruan dengan mengintegrasikan Teori Kapabilitas Amartya Sen ke dalam model struktural kuantitatif. Hasil penelitian diharapkan memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan anggaran yang seimbang antara pembangunan fisik, peningkatan modal manusia, dan perlindungan sosial untuk mencapai kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Kapabilitas Amartya Sen dan Konsep Kemiskinan

Penelitian ini berlandaskan pada *Capability Approach* yang dikemukakan oleh Amartya Sen (1985; 1992; 1999). Sen menyatakan bahwa kemiskinan pada hakikatnya bukan sekadar persoalan rendahnya pendapatan, melainkan bentuk *capability deprivation*, yaitu keterbatasan individu dalam mencapai *functionings* penting seperti hidup sehat, berpendidikan, dan produktif. Dalam kerangka ini, kesejahteraan dipahami sebagai kemampuan riil individu (*real freedoms*) untuk menjalani kehidupan yang bernilai, bukan sekadar penguasaan sumber daya ekonomi. Sen (1992) menekankan bahwa kesejahteraan individu seharusnya dinilai berdasarkan kebebasan riil untuk mencapai fungsi-fungsi hidup dasar, sedangkan kepemilikan pendapatan atau komoditas hanya merupakan sarana untuk memperluas kapabilitas.

Lebih lanjut, Sen (1992) menekankan bahwa perluasan kapabilitas sangat dipengaruhi oleh *instrumental freedoms*, yang mencakup akses terhadap layanan publik, infrastruktur dasar, pendidikan, serta perlindungan sosial. Infrastruktur, pendidikan, dan bantuan sosial berperan sebagai *conversion factors* yang memungkinkan masyarakat mengubah sumber daya yang ada menjadi kesejahteraan nyata. Dengan demikian, kemiskinan dipandang sebagai fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh ketimpangan akses terhadap layanan dasar dan efektivitas kebijakan publik.

Kapasitas Fiskal Daerah (PAD) dan Bantuan Sosial

Dalam konteks desentralisasi fiskal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan kemandirian dan kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan serta program sosial. Musgrave (1959) menegaskan bahwa pemerintah memiliki fungsi redistribusi melalui belanja publik untuk mengurangi ketimpangan kesejahteraan.

Kapasitas fiskal yang kuat menciptakan ruang fiskal (*fiscal space*) yang memungkinkan pemerintah daerah meningkatkan Rasio Belanja Bantuan Sosial secara berkelanjutan. Mahi (2016) menyebutkan bahwa daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi cenderung lebih fleksibel mendanai program pro-poor, sedangkan World Bank (2022) menekankan bahwa efektivitas intervensi sosial sangat ditentukan oleh keberlanjutan pendanaan. Secara empiris, Yushkov (2015) serta Faguet & Pöschl (2015) menunjukkan bahwa otonomi fiskal membuat

pemerintah daerah lebih responsif dalam mengalokasikan belanja sosial dibanding daerah yang bergantung pada transfer.

Berbagai studi juga menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah berkorelasi dengan perluasan perlindungan sosial dan penurunan kemiskinan. Lewis (2017) menyatakan bahwa daerah dengan pendapatan mandiri besar lebih mampu menyediakan layanan sosial. Martinez-Vazquez et al. (2017) menemukan bahwa desentralisasi fiskal yang didukung kapasitas pendapatan memadai meningkatkan belanja sosial. Bukti di Indonesia juga menunjukkan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdampak negatif terhadap kemiskinan (Anggraeni et al., 2023; Deviyanti et al., 2025; Siburian, 2022). Berdasarkan argumen tersebut, diajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Rasio KPM Bansos Pangan.

H2: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Rasio Belanja Bantuan Sosial.

H3: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan.

Pendidikan (RLS) sebagai Faktor Konversi Kapabilitas

Dalam pendekatan kapabilitas, pendidikan merupakan faktor konversi personal yang memperkuat kemampuan individu dalam memanfaatkan peluang ekonomi dan sosial. *Human Capital Theory* menegaskan bahwa pendidikan meningkatkan produktivitas dan mobilitas ekonomi (Schultz, 1980). Secara empiris, pendidikan terbukti memberikan return tinggi terutama di negara berkembang (Psacharopoulos & Patrinos, 2018) dan berperan memutus kemiskinan antargenerasi (Doytch & Uctum, 2016; Hofmarcher, 2021).

Di era digital, pendidikan juga berperan penting dalam membentuk literasi dan permintaan terhadap teknologi. Van Deursen & Van Dijk (2019) menyatakan bahwa kesenjangan digital sangat dipengaruhi kesenjangan pendidikan, sedangkan Pick & Sarkar (2015) menekankan pendidikan sebagai demand creation layanan digital. Straub et al. (2025) menambahkan bahwa pendidikan merupakan faktor komplementer penting bagi efektivitas infrastruktur.

Namun, hubungan pendidikan dengan Akses Kesehatan (Puskesmas) dapat bersifat ambigu. Wilayah berpendidikan rendah sering menjadi prioritas pembangunan fasilitas kesehatan (Rosenzweig & Wolpin, 1986), dan masyarakat berpendidikan tinggi cenderung memilih layanan kesehatan swasta sehingga hubungan statistiknya bisa negatif atau tidak langsung (Liu et al., 2017). Berdasarkan tinjauan tersebut, dirumuskan hipotesis:

H4: Rata-Rata Lama Sekolah berpengaruh terhadap Akses Internet.

H5: Rata-Rata Lama Sekolah berpengaruh terhadap Akses Kesehatan (Puskesmas).

H6: Rata-Rata Lama Sekolah berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan.

Infrastruktur Dasar sebagai Kebebasan Instrumental

Infrastruktur dasar merupakan bagian dari *instrumental freedom* yang meningkatkan produktivitas masyarakat. Aschauer (1989) menegaskan investasi infrastruktur publik memiliki efek pengganda, sedangkan Fan et al. (2002) menunjukkan infrastruktur menurunkan biaya transaksi masyarakat miskin.

Akses listrik terbukti berkorelasi dengan penurunan kerentanan ekonomi (Churchill & Smyth, 2021). di Indonesia, temuan ini didukung oleh Christiani & Nainupu (2021) yang membuktikan bahwa peningkatan Akses Listrik berdampak negatif terhadap kemiskinan di Nusa Tenggara Timur. Akses Sanitasi layak juga berkontribusi besar melalui penurunan beban penyakit dan biaya rumah tangga (Hutton & Chase, 2018; Prüss-Ustün et al., 2019), serta berpengaruh negatif terhadap kemiskinan sejalan dengan Pramono, (2018) yang menekankan pentingnya ketersediaan infrastruktur dasar bagi kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Akses Internet mampu meningkatkan peluang ekonomi digital dan pendapatan rumah tangga (Galperin & Fernanda Viacens, 2017), serta mendorong inklusi keuangan dan e-commerce yang membantu keluar dari perangkap kemiskinan (Masaki et al., 2020), Atas dasar tersebut, dirumuskan hipotesis:

H7: Akses Listrik berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan.

H8: Akses Sanitasi Layak berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan.

H9: Akses Internet berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan.

Akses Kesehatan (Puskesmas) dan Endogenous Program Placement

Secara normatif, ketersediaan fasilitas kesehatan publik diharapkan menurunkan kemiskinan. Namun, Rosenzweig & Wolpin (1986) menjelaskan adanya *endogenous program placement*, yaitu kecenderungan pemerintah menempatkan fasilitas publik di wilayah miskin sebagai kebijakan afirmatif.

Jalan & Ravallion (2000) serta Ravallion (2016) menekankan bahwa intervensi publik sering diarahkan pada wilayah dengan kebutuhan tertinggi, sehingga evaluasi program dapat bias. Acharya et al. (2010) menambahkan bahwa distribusi fasilitas sering merupakan strategi pemerataan akses. Hal ini dapat menyebabkan hubungan statistik positif antara jumlah fasilitas kesehatan dan kemiskinan, yang tidak selalu mencerminkan kegagalan program melainkan efek penargetan kebijakan. Berdasarkan argumentasi tersebut, dirumuskan hipotesis:

H10: Akses Kesehatan (Puskesmas) berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan.

Bantuan Sosial sebagai Perlindungan Kapabilitas

Dalam perspektif kapabilitas, bantuan sosial merupakan bentuk *protective security* yang menjaga masyarakat dari kerentanan ekstrem (Sen, 1999). Musgrave (1959) juga menekankan

bantuan sosial sebagai instrumen redistribusi, sedangkan Barrientos (2013) menyebutnya sebagai jaring pengaman sosial.

Dalam konteks bantuan pangan, Timmer et al. (2010) menekankan pentingnya kebijakan pangan untuk menjaga konsumsi masyarakat miskin. Secara empiris, bantuan pangan berpengaruh terhadap stabilisasi konsumsi dan pengurangan risiko kemiskinan (Anggara & Alfahma, 2025). Rasio Belanja Bantuan Sosial juga terbukti menurunkan kemiskinan (Sumiyarti, 2022) dan secara luas konsisten berkorelasi dengan penurunan kemiskinan absolut di negara berkembang (Lustig, 2018; Popova, 2023). Namun efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas tata kelola (Buchanan & Tullock, 1965). Selain itu, perlu dipertimbangkan bahwa alokasi bantuan sosial sering kali bersifat endogen, di mana wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi cenderung menerima anggaran yang lebih besar sebagai bentuk respon kebijakan (Ravallion, 2016). Berdasarkan argumen tersebut, dirumuskan hipotesis:

H11: Rasio KPM Bansos Pangan berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan.

H12: Rasio Belanja Bantuan Sosial berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Desain dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori untuk menguji hubungan kausal antarvariabel dalam kerangka *Capability Approach* yang dikembangkan oleh Amartya Sen. Metode penelitian merupakan prosedur sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data guna memperoleh pemahaman terhadap fenomena yang diteliti (Zulkarnaen et al., 2020). Model penelitian dirancang untuk menganalisis pengaruh kapasitas fiskal dan modal manusia terhadap tingkat kemiskinan dengan mempertimbangkan peran mediasi infrastruktur sosial dan perlindungan sosial.

Data yang digunakan merupakan data panel tingkat provinsi periode 2018–2024. Meskipun data berbentuk panel, penelitian ini tidak menggunakan regresi panel konvensional, melainkan pendekatan *Structural Equation Modeling–Partial Least Squares* (SEM-PLS) berbasis variance. Pemilihan SEM-PLS didasarkan pada beberapa pertimbangan metodologis.

Pertama, model penelitian memiliki struktur hubungan yang kompleks dan melibatkan beberapa jalur mediasi simultan. Regresi panel konvensional hanya mampu mengestimasi hubungan parsial dan tidak dapat menguji efek langsung dan tidak langsung secara simultan dalam satu sistem persamaan terpadu.

Kedua, dibandingkan dengan SEM berbasis kovarians (CB-SEM), pendekatan SEM-PLS lebih sesuai untuk penelitian yang bersifat prediktif dan eksploratif struktural, serta tidak mensyaratkan asumsi normalitas multivariat yang ketat (Kock, 2020; Sholihin & Ratmono, 2021). Data sekunder tingkat provinsi berpotensi mengandung heterogenitas regional dan

distribusi yang tidak sepenuhnya normal, sehingga pendekatan *variance-based* dinilai lebih robust.

Ketiga, tujuan penelitian ini adalah menguji mekanisme struktural dan kemampuan prediktif hubungan antarvariabel dalam konteks desentralisasi fiskal, bukan semata-mata menguji kesesuaian model teoritis secara konfirmatori. Oleh karena itu, SEM-PLS dipandang lebih tepat secara epistemologis dan teknis.

Penggunaan SEM-PLS dalam penelitian ini dipertimbangkan berdasarkan karakteristik data panel antarprovinsi yang bersifat heterogen serta potensi distribusi variabel fiskal dan sosial yang tidak sepenuhnya normal. Dibandingkan dengan regresi panel konvensional yang umumnya menguji hubungan secara parsial, SEM-PLS memungkinkan estimasi simultan hubungan langsung dan tidak langsung dalam satu sistem persamaan struktural terpadu. Selain itu, pendekatan ini lebih fleksibel terhadap asumsi distribusi data dan berorientasi pada prediksi, sehingga sesuai untuk model dengan struktur mediasi yang kompleks dalam konteks pembangunan daerah (Kock, 2020).

Analisis deskriptif tetap dilakukan untuk menggambarkan karakteristik distribusi data, variasi antarprovinsi, dan dinamika periode pengamatan. Namun, analisis deskriptif diposisikan sebagai analisis pelengkap yang mendukung interpretasi model struktural, bukan sebagai pendekatan metodologis yang berdiri.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian mencakup seluruh pemerintah daerah tingkat provinsi di Indonesia. Unit analisis dalam penelitian ini adalah 34 provinsi yang diamati selama periode 2018–2024.

Pemilihan tingkat provinsi didasarkan pada pertimbangan bahwa kapasitas fiskal daerah, alokasi bantuan sosial, serta indikator pembangunan infrastruktur dasar secara struktural berada pada kewenangan pemerintah provinsi dalam kerangka desentralisasi fiskal. Selain itu, data resmi yang tersedia secara konsisten dan terstandarisasi pada level agregasi tahunan tersedia secara lengkap pada tingkat provinsi.

Penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh (*census sampling*), karena seluruh populasi provinsi dijadikan objek observasi. Data panel yang digunakan bersifat *balanced panel*, di mana setiap provinsi memiliki jumlah observasi yang sama selama tujuh tahun pengamatan.

Dengan demikian, total observasi penelitian berjumlah: 34 provinsi \times 7 tahun = 238 observasi. Data bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2024; Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, 2024)

Pengukuran Variabel

Variabel dalam penelitian ini diklasifikasikan berdasarkan perannya dalam model *Structural Equation Modeling* (SEM) menjadi variabel eksogen, variabel endogen, dan variabel mediasi. Variabel eksogen meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Akses Listrik (LISTRIK), dan Akses Sanitasi Layak (SANITASI), karena tidak menerima pengaruh dari konstruk lain dalam model struktural. Variabel endogen utama adalah Tingkat Kemiskinan (POVERTY). Sementara itu, variabel mediasi yang secara struktural termasuk kategori endogen karena menerima pengaruh dari variabel eksogen dan sekaligus memengaruhi kemiskinan adalah Akses Internet (INTERNET), Rasio Puskesmas (PUSKESMAS), Rasio Belanja Bantuan Sosial (BANSOS), dan Rasio KPM Bantuan Pangan (BANPANG).

Tingkat Kemiskinan (POVERTY) diukur menggunakan persentase penduduk miskin terhadap total penduduk pada masing-masing provinsi. Variabel ini merupakan indikator resmi nasional yang digunakan untuk menggambarkan kondisi kemiskinan regional.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan sebagai proksi kapasitas fiskal daerah dan diukur menggunakan logaritma natural (Ln) dari total realisasi PAD dalam satuan rupiah. Transformasi logaritma dilakukan untuk mengurangi *skewness* serta meminimalkan perbedaan skala nominal antarprovinsi.

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) diukur berdasarkan rata-rata jumlah tahun pendidikan formal yang ditempuh oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas. Variabel ini mencerminkan kapabilitas sumber daya manusia dalam kerangka *Capability Approach*.

Variabel infrastruktur dasar diukur melalui Akses Listrik (LISTRIK), Akses Sanitasi Layak (SANITASI), dan Akses Internet (INTERNET). LISTRIK diukur melalui persentase rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan utama. SANITASI diukur melalui persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi layak. INTERNET diukur berdasarkan persentase rumah tangga yang pernah mengakses internet dalam tiga bulan terakhir.

Akses kesehatan diproksikan melalui Rasio Puskesmas (PUSKESMAS), yang diukur berdasarkan jumlah puskesmas per 100.000 penduduk untuk mencerminkan ketersediaan fasilitas kesehatan publik. Variabel perlindungan sosial diukur melalui Rasio Belanja Bantuan Sosial (BANSOS), yaitu rasio realisasi belanja bantuan sosial terhadap pagu anggaran bantuan sosial daerah, serta Rasio KPM Bantuan Pangan (BANPANG), yaitu persentase keluarga penerima bantuan pangan terhadap jumlah penduduk miskin.

Seluruh variabel digunakan dalam satuan persentase, rasio, atau tahun sesuai dengan standar publikasi resmi BPS dan DJPK. Transformasi logaritma natural hanya diterapkan pada variabel PAD untuk menjaga konsistensi skala dan meningkatkan stabilitas estimasi model.

Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak WarpPLS 7.0. Proses estimasi diawali dengan evaluasi model pengukuran (*outer model*). Karena seluruh konstruk dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator tunggal (*single-indicator constructs*), pengujian model pengukuran difokuskan pada kesesuaian konseptual antara indikator dan definisi teoritisnya (*content validity*). Validitas operasional indikator didasarkan pada standar pengukuran resmi yang diterbitkan oleh BPS dan DJPK.

Selanjutnya, evaluasi model struktural (*inner model*) dilakukan untuk menguji hubungan kausal antarvariabel. Kelayakan model dianalisis melalui beberapa indeks kecocokan model (*model fit indices*), yaitu *Average Path Coefficient* (APC), *Average R-Squared* (ARS), *Average Adjusted R-Squared* (AARS), dan *Average Full Collinearity VIF* (AFVIF). Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur kemampuan variabel eksogen dan mediasi dalam menjelaskan variabel endogen. Selain itu, *effect size* (f^2) dianalisis untuk mengetahui kontribusi relatif masing-masing jalur struktural, sedangkan *predictive relevance* (Q^2) digunakan untuk menilai kemampuan prediktif model.

Pengujian hipotesis, termasuk efek langsung dan tidak langsung (mediasi), dilakukan melalui prosedur *bootstrapping*. Hubungan antarvariabel dinyatakan signifikan apabila nilai p-value lebih kecil dari 0,05. Dengan pendekatan ini, SEM-PLS memungkinkan estimasi simultan hubungan langsung dan tidak langsung dalam satu sistem persamaan struktural terpadu, sehingga sesuai untuk menjelaskan mekanisme pengaruh kapasitas fiskal dan modal manusia terhadap tingkat kemiskinan pada level provinsi.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis empiris ini didasarkan pada dataset panel yang terdiri dari 238 observasi yang mencakup seluruh provinsi di Indonesia selama periode penelitian. Sampel ini memberikan fondasi yang kokoh untuk menjawab pertanyaan penelitian, memastikan bahwa bukti empiris yang dihasilkan mewakili dinamika pembangunan daerah secara nasional.

Statistik deskriptif yang dilaporkan menyoroti variasi yang cukup besar di seluruh indikator penelitian. Pada dimensi infrastruktur, Akses Listrik menunjukkan tingkat keseragaman tertinggi dengan nilai rata-rata 98,09% dan nilai maksimum mencapai 100%, yang mencerminkan cakupan layanan energi yang hampir universal di berbagai wilayah. Sebaliknya, Akses Kesehatan (Puskesmas) dan Akses Internet menunjukkan dispersi data yang jauh lebih

luas dari nilai rata-ratanya, yang tecermin dari standar deviasi masing-masing sebesar 8,279 dan 13,265. Dispersi yang tinggi ini menandakan adanya heterogenitas atau ketimpangan yang nyata dalam kesiapan infrastruktur fisik dan digital antarprovinsi.

Terkait intervensi pemerintah, Rasio Belanja Bantuan Sosial mencatat nilai rata-rata yang relatif rendah yaitu 0,73%, namun memiliki nilai maksimum sebesar 10,60%. Hal ini mengindikasikan adanya lonjakan pengeluaran sosial yang signifikan pada periode atau daerah tertentu, kemungkinan sebagai respons terhadap kondisi mendesak. Sementara itu, variabel modal manusia yaitu rata-rata lama sekolah menunjukkan *fluktuasi* yang relatif moderat (standar deviasi 0,935), dengan capaian pendidikan rata-rata berada di angka 8,73 tahun.

Terakhir, variabel utama tingkat kemiskinan mencatat nilai minimum sebesar 3,47% dan maksimum 27,74%, dengan standar deviasi 5,288. Rentang data yang lebar ini menunjuk pada heterogenitas yang tajam dalam tingkat kesejahteraan ekonomi, sekaligus mengonfirmasi adanya kesenjangan pembangunan yang signifikan antara provinsi yang paling maju dan yang paling tertinggal dalam sampel penelitian.

Hasil Analisis SEM-PLS

Evaluasi model pengukuran (*outer model*) menunjukkan bahwa seluruh indikator valid dengan nilai loading 1,000 dan signifikan ($p < 0,001$). Uji asumsi klasik juga memastikan model bebas dari masalah multikolinieritas karena seluruh nilai VIF berada di bawah 5.

Secara keseluruhan, model struktural memiliki kecocokan yang sangat baik dengan data. Hal ini dibuktikan oleh indikator model fit utama, yaitu APC (0,278) dan ARS (0,378) yang signifikan, serta nilai *Goodness of Fit* (GoF) sebesar 0,615 yang tergolong dalam kategori besar (*large*).

Pada evaluasi struktural (*inner model*), variabel independen (Pendapatan Asli Daerah, Rata-Rata Lama Sekolah, Rasio Belanja Bantuan Sosial, Infrastruktur) mampu menjelaskan 74,5% variasi Tingkat Kemiskinan ($R^2 = 0,745$). Pengaruh parsial (*effect size*) terkuat ditemukan pada hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD terhadap Rasio Belanja Bantuan Sosial ($f^2 = 0,557$) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) terhadap Akses Internet ($f^2 = 0,455$).

Terakhir, model terbukti memiliki kemampuan prediksi yang relevan. Nilai Q^2 untuk seluruh variabel endogen (Tingkat Kemiskinan, Rasio Belanja Bantuan Sosial, dan Akses Internet) bernilai positif (> 0), yang menegaskan validitas prediktif model ini.

Hasil Analisis Jalur

Hasil estimasi model struktural SEM-PLS menunjukkan bahwa hubungan antar variabel dalam penelitian memiliki pola pengaruh yang beragam. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh positif terhadap Rasio KPM Bansos Pangan dengan koefisien jalur sebesar 0,19, serta berpengaruh positif kuat terhadap Rasio Belanja Bantuan Sosial dengan

koefisien sebesar 0,75. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan dengan koefisien sebesar -0,19.

Selanjutnya, variabel Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan pengaruh positif yang kuat terhadap Akses Internet dengan koefisien sebesar 0,67. Namun demikian, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) berpengaruh negatif terhadap Akses Kesehatan (Puskesmas) dengan koefisien sebesar -0,31, serta berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan dengan koefisien sebesar -0,24.

Pada dimensi infrastruktur, Akses Listrik berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan dengan koefisien sebesar -0,29. Akses Sanitasi Layak juga menunjukkan pengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan dengan koefisien sebesar -0,12, sedangkan Akses Internet berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan dengan koefisien sebesar -0,10. Sementara itu, Akses Kesehatan (Puskesmas) menunjukkan pengaruh positif terhadap Tingkat Kemiskinan dengan koefisien sebesar 0,12.

Selain itu, Rasio KPM Bansos Pangan berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan dengan koefisien sebesar -0,11. Rasio Belanja Bantuan Sosial juga menunjukkan pengaruh positif terhadap Tingkat Kemiskinan dengan koefisien sebesar 0,24.

Hasil Uji Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Rasio KPM Bansos Pangan dengan nilai koefisien sebesar 0,19 dan $p\text{-value} < 0,01$. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga berpengaruh terhadap Rasio Belanja Bantuan Sosial dengan koefisien sebesar 0,75 dan $p\text{-value} < 0,01$. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan dengan koefisien sebesar -0,19 dan $p\text{-value} < 0,01$.

Variabel Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) terbukti berpengaruh terhadap Akses Internet dengan koefisien sebesar 0,67 dan $p\text{-value} < 0,01$. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) juga berpengaruh terhadap Akses Kesehatan (Puskesmas) dengan koefisien sebesar -0,31 dan $p\text{-value} < 0,01$. Selanjutnya, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan dengan koefisien sebesar -0,24 dan $p\text{-value} < 0,01$.

Pada variabel infrastruktur, Akses Listrik berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan dengan koefisien sebesar -0,29 dan $p\text{-value} < 0,01$. Akses Sanitasi Layak juga berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan dengan koefisien sebesar -0,12 dan $p\text{-value}$ sebesar 0,03. Akses Internet berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan dengan koefisien sebesar -0,10 dan $p\text{-value}$ sebesar 0,05. Namun, Akses Kesehatan (Puskesmas) menunjukkan pengaruh positif terhadap Tingkat Kemiskinan dengan koefisien sebesar 0,12 dan $p\text{-value}$ sebesar 0,03.

Selain itu, Rasio KPM Bantuan Sosial Pangan berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan dengan koefisien sebesar -0,11 dan *p-value* sebesar 0,05. Rasio Belanja Bantuan Sosial juga terbukti berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan dengan koefisien sebesar 0,24 dan *p-value* < 0,01.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Rasio KPM Bansos Pangan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Rasio KPM Bansos Pangan. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu provinsi, maka semakin besar pula cakupan rumah tangga yang dapat dijangkau dalam program bantuan pangan. Dengan kata lain, kapasitas fiskal daerah menjadi faktor penting dalam memperluas akses kelompok miskin terhadap program perlindungan sosial berbasis pangan.

Temuan ini mengonfirmasi konsep *fiscal space* (Mahi, 2016), di mana kapasitas fiskal yang kuat memberikan ruang fleksibilitas bagi pemerintah daerah untuk memperluas cakupan perlindungan sosial. Hal ini sejalan dengan Lewis (2017) serta Boadway et al. (2024) yang menegaskan bahwa kemandirian fiskal meningkatkan responsivitas daerah dalam merancang program inklusif. Secara operasional, ketersediaan anggaran lokal terbukti krusial dalam menjamin efektivitas penyaluran dan keberlanjutan ekspansi penerima manfaat. Murshed et al. (2022) menegaskan bahwa kapasitas fiskal yang lebih kuat mendorong peningkatan belanja perlindungan sosial, sehingga pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih besar untuk memperluas cakupan penerima bantuan. Sementara itu, Bastagli et al. (2016) menekankan bahwa keberhasilan program bantuan sosial sangat ditentukan oleh kesinambungan pendanaan dan tata kelola implementasi, karena tanpa dukungan anggaran yang stabil maka perluasan penerima manfaat sulit dilakukan secara berkelanjutan. Temuan ini menyarankan agar pemerintah daerah tidak lagi melihat Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekadar untuk biaya operasional kantor. Sebaliknya, optimalisasi pajak dan retribusi harus dijadikan strategi utama guna memastikan program bantuan sosial bagi warga miskin tetap terjaga dan jangkauannya semakin luas.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Rasio Belanja Bantuan Sosial

Analisis menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Rasio Belanja Bantuan Sosial. Temuan ini menegaskan bahwa daerah dengan pendapatan asli yang lebih besar cenderung memiliki kapasitas fiskal yang lebih memadai untuk mengalokasikan Rasio Belanja Bantuan Sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam mengumpulkan pendapatan menjadi faktor yang menentukan kekuatan program perlindungan sosial, terutama dalam aspek pendanaan dan kontinuitas kebijakan.

Hasil ini mendukung teori redistribusi Musgrave (1959) yang menyatakan bahwa fungsi redistribusi pemerintah akan berjalan optimal apabila ditopang oleh kapasitas fiskal yang kuat. Konsisten dengan Martinez-Vazquez et al. (2017) dan Yushkov (2015), daerah dengan pendapatan tinggi cenderung mengalokasikan belanja sosial secara lebih stabil dan berkelanjutan. Faguet & Pöschl (2015) serta Langi et al. (2023) turut mengonfirmasi bahwa otonomi fiskal membuat pemerintah daerah lebih responsif dalam mengalokasikan anggaran pro-poor dibandingkan daerah yang bergantung pada dana transfer. Oleh karena itu, implikasi praktis bagi pemerintah daerah adalah perlunya mendesain kebijakan fiskal yang memprioritaskan alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) surplus untuk memperkuat bantalan sosial (*social safety net*), guna memastikan kelompok rentan tetap terlindungi di tengah fluktuasi ekonomi.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian Anggraeni et al. (2023) menemukan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam konteks desentralisasi fiskal di Indonesia berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan melalui penguatan kapasitas fiskal daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan program pembangunan pro-kemiskinan. Temuan ini sejalan dengan pandangan Mahi (2016) yang menegaskan bahwa peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperluas *fiscal space* pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan program sosial yang berdampak pada pengurangan kemiskinan.

Temuan serupa diperoleh dalam studi Siburian (2022) yang menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal yang lebih kuat termasuk kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkorelasi negatif dengan tingkat kemiskinan antar provinsi di Indonesia. Empiris lokal di tingkat kabupaten/kota juga mendukung hasil ini, di mana Deviyanti et al. (2025) melaporkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdampak negatif signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Purbalingga. Hal ini memperkuat argumen bahwa daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi memiliki kapasitas lebih besar dalam menyediakan layanan publik dan program pembangunan inklusif secara lebih efektif, sebagaimana ditegaskan dalam kajian desentralisasi fiskal oleh (Mahi, 2016). Temuan ini menyiratkan bahwa strategi pengentasan kemiskinan harus dimulai dari penguatan kemandirian fiskal daerah; pemerintah perlu fokus pada reformasi administrasi perpajakan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang kemudian diarahkan secara presisi untuk membiayai program-program pengentasan kemiskinan yang bersifat produktif.

Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Akses Internet

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) berpengaruh positif terhadap Akses Internet. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, semakin besar kemampuan mereka dalam memanfaatkan teknologi informasi. Pendidikan berperan sebagai modal dasar dalam meningkatkan literasi digital serta memperluas peluang masyarakat dalam memperoleh informasi dan layanan berbasis teknologi.

Temuan ini mendukung konsep *conversion factors* dalam perspektif kapabilitas Amartya Sen, di mana pendidikan merupakan faktor kunci yang meningkatkan kemampuan individu untuk mengubah akses teknologi menjadi manfaat nyata. Hasil ini juga sejalan dengan Van Deursen & Van Dijk (2019) serta Straub et al. (2025) yang menegaskan bahwa ketersediaan infrastruktur fisik harus diimbangi dengan investasi pada modal manusia agar teknologi dapat diadopsi secara efektif oleh kelompok miskin. Lebih lanjut, Pick & Sarkar (2015) menambahkan bahwa pendidikan mampu menciptakan permintaan (*demand creation*) terhadap layanan digital yang lebih kuat, yang pada akhirnya mendorong integrasi teknologi dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa membangun infrastruktur digital saja tidaklah cukup. Agar dampaknya optimal, pembangunan fisik harus sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan dan literasi digital. Dengan kata lain, pemerataan Akses Internet dan pengembangan SDM harus menjadi satu paket kebijakan yang tidak terpisahkan.

Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Akses Kesehatan (Puskesmas)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) berpengaruh negatif terhadap Akses Kesehatan (Puskesmas). Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan tingkat pendidikan tidak serta-merta meningkatkan ketergantungan masyarakat pada fasilitas kesehatan publik tingkat dasar (Puskesmas). Sebaliknya, kondisi ini mencerminkan adanya pergeseran preferensi layanan kesehatan seiring dengan meningkatnya modal manusia.

Temuan tersebut dapat dijelaskan melalui fenomena substitusi layanan. Masyarakat dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki literasi kesehatan yang lebih baik dan kapasitas ekonomi yang lebih kuat untuk mengakses fasilitas kesehatan swasta atau layanan spesialis yang dianggap lebih responsif (Liu et al., 2017). Dalam perspektif Amartya Sen, peningkatan pendidikan berfungsi sebagai *conversion factor* yang meningkatkan kemampuan individu untuk memilih (*choice*) jenis layanan kesehatan yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, hasil ini mendukung hipotesis *Endogenous Program Placement* (Rosenzweig & Wolpin, 1986), di mana pemerintah secara sengaja mengalokasikan pembangunan Puskesmas sebagai intervensi afirmatif di wilayah dengan tingkat modal manusia yang masih rendah. Oleh karena itu, hubungan negatif ini menunjukkan bahwa distribusi

Puskesmas di Indonesia telah mengikuti pola *need-based targeting* untuk menjamin pemerataan akses bagi kelompok yang paling rentan (Acharya et al., 2010). Implikasinya, strategi kesehatan harus dibedakan: penguatan akses fisik di daerah berpendidikan rendah, dan peningkatan kualitas serta diversifikasi layanan spesialis di daerah dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Tingkat Kemiskinan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka semakin rendah tingkat kemiskinan yang terjadi. Pendidikan berperan sebagai faktor fundamental dalam meningkatkan produktivitas individu, memperluas peluang kerja, serta memperkuat kemampuan rumah tangga dalam meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan.

Temuan ini mengafirmasi teori modal manusia (Schultz, 1980) yang menekankan bahwa pendidikan meningkatkan produktivitas marginal tenaga kerja dan kapasitas individu dalam memperoleh penghasilan. Hasil penelitian ini konsisten dengan Psacharopoulos & Patrinos (2018) serta Doytch & Uctum (2016) yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Hofmarcher (2021) menambahkan bahwa investasi modal manusia memberikan efek multiplier jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Oleh karena itu, pemerintah harus menempatkan anggaran fungsi pendidikan sebagai prioritas mutlak, dengan fokus khusus pada program wajib belajar 12 tahun dan pelatihan vokasi bagi masyarakat miskin, guna memastikan bonus demografi tidak berubah menjadi beban demografi akibat rendahnya kualitas SDM.

Pengaruh Akses Listrik terhadap Tingkat Kemiskinan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akses Listrik berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi persentase rumah tangga yang memiliki Akses Listrik, maka semakin rendah tingkat kemiskinan suatu wilayah. Listrik menjadi prasyarat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi rumah tangga, memperpanjang jam produktif, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Hasil ini memvalidasi peran listrik sebagai instrumental freedom dalam teori kapabilitas Sen (1999), di mana akses terhadap energi meningkatkan kemampuan individu untuk menjalankan fungsi ekonomi dan sosial. Churchill & Smyth (2021) membuktikan bahwa elektrifikasi mampu meningkatkan produktivitas serta memperkuat aktivitas usaha mikro rumah tangga. Selain itu, penelitian Christiani & Nainupu (2021) memberikan bukti empiris bahwa peningkatan Akses Listrik berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, khususnya di wilayah dengan tantangan geografis seperti Nusa Tenggara Timur. Hal ini menegaskan bahwa

Akses Listrik merupakan infrastruktur dasar yang mendukung pengurangan kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan dan kapasitas ekonomi masyarakat. Implikasi praktisnya, kebijakan energi nasional harus memprioritaskan program elektrifikasi pedesaan dan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), serta memastikan keandalan pasokan listrik yang stabil agar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif usaha mikro, bukan sekadar untuk penerangan konsumtif.

Pengaruh Akses Sanitasi Layak terhadap Tingkat Kemiskinan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akses Sanitasi Layak berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan akses sanitasi layak berkontribusi dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Sanitasi layak dapat menekan risiko penyakit, mengurangi beban pengeluaran rumah tangga untuk kesehatan, serta meningkatkan produktivitas masyarakat, terutama pada kelompok rentan.

Temuan ini sejalan dengan teori kesehatan sebagai modal produktivitas, di mana investasi sanitasi layak memiliki economic return yang tinggi melalui penghematan biaya kesehatan serta peningkatan kualitas hidup Masyarakat (Hutton & Chase, 2018). Penelitian empiris juga menunjukkan bahwa akses sanitasi layak berkontribusi terhadap pengurangan tingkat kemiskinan, sejalan dengan temuan Pramono (2018) yang menegaskan bahwa ketersediaan infrastruktur dasar, termasuk sanitasi layak, merupakan determinan krusial dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Selain itu, bukti dari analisis lintas negara dan studi literatur menunjukkan bahwa akses ke sanitasi layak yang lebih baik secara konsisten terkait dengan penurunan berbagai indikator kemiskinan dan kesenjangan kesejahteraan karena menurunkan beban penyakit dan meningkatkan kapasitas ekonomi rumah tangga (Prüss-Ustün et al., 2019). Temuan ini memberikan implikasi bahwa intervensi akses sanitasi layak tidak boleh hanya dipandang sebagai isu kesehatan lingkungan semata, tetapi sebagai strategi ekonomi; pemerintah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur akses sanitasi layak komunal di permukiman padat penduduk miskin untuk mengurangi beban biaya kesehatan rumah tangga.

Pengaruh Akses Internet terhadap Tingkat Kemiskinan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akses Internet berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi Akses Internet rumah tangga, maka semakin rendah tingkat kemiskinan yang terjadi. Akses Internet membuka peluang bagi masyarakat untuk mengakses informasi ekonomi, pendidikan, layanan keuangan digital, serta peluang kerja baru yang dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Hasil ini mendukung teori penurunan biaya transaksi (Fan et al., 2002), di mana internet mampu menurunkan hambatan akses pasar dan memperluas konektivitas ekonomi. Galperin &

Fernanda Viacens (2017) menunjukkan bahwa internet menciptakan peluang kerja baru melalui *gig economy* bagi kelompok berpendapatan rendah. Selain itu, Masaki et al. (2020) menegaskan bahwa Akses Internet dapat mendorong inklusi keuangan dan pengembangan *e-commerce* yang membantu rumah tangga keluar dari perangkap kemiskinan. Oleh karena itu pemerintah harus mendorong penetrasi Akses Internet yang lebih merata dan terjangkau, serta memfasilitasi ekosistem ekonomi digital lokal (seperti marketplace UMKM) agar Akses Internet dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat miskin untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Pengaruh Akses Kesehatan (Puskesmas) terhadap Tingkat Kemiskinan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akses Kesehatan (Puskesmas) berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemiskinan. Temuan ini mengindikasikan bahwa wilayah dengan Akses Kesehatan (Puskesmas) yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi pula. Secara statistik, hubungan ini merepresentasikan korelasi positif antara densitas fasilitas kesehatan publik dan kondisi sosio-ekonomi daerah.

Temuan tersebut dapat dijelaskan melalui fenomena *Endogenous Program Placement* yang dikemukakan oleh Rosenzweig & Wolpin (1986), yaitu kecenderungan pemerintah menempatkan fasilitas publik pada wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi sebagai bentuk kebijakan afirmatif. Hal ini diperkuat oleh Ravallion (2016) yang menegaskan bahwa evaluasi program publik seringkali menghadapi bias karena intervensi sosial memang diarahkan pada kelompok atau wilayah yang paling membutuhkan (*need-based targeting*). Oleh karena itu, hubungan positif dalam model ini tidak boleh diinterpretasikan sebagai Akses Kesehatan (Puskesmas) yang menyebabkan kemiskinan, melainkan mencerminkan bahwa distribusi pembangunan fasilitas kesehatan telah menyasar kantong-kantong kemiskinan. Implikasi kebijakannya adalah strategi pengentasan kemiskinan di sektor kesehatan tidak cukup hanya dengan menambah kuantitas bangunan fisik Puskesmas. Pemerintah harus lebih fokus pada peningkatan kualitas layanan medis, ketersediaan obat-obatan, dan kompetensi tenaga kesehatan agar infrastruktur yang telah dibangun mampu secara efektif meningkatkan derajat kesehatan dan kapabilitas masyarakat miskin.

Pengaruh Rasio KPM Bansos Pangan terhadap Tingkat Kemiskinan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio KPM Bansos Pangan berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin besar proporsi penerima bantuan pangan dibandingkan rumah tangga sasaran, maka semakin rendah tingkat kemiskinan suatu wilayah. Bantuan pangan berperan sebagai instrumen penting dalam menjaga ketahanan konsumsi rumah tangga miskin, khususnya dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil.

Temuan ini memvalidasi fungsi *capability protection* dalam perspektif kapabilitas Sen (1999), di mana bantuan sosial menjaga kemampuan dasar rumah tangga miskin agar tetap

dapat memenuhi kebutuhan fundamental. Timmer et al. (2010) menegaskan bahwa kebijakan bantuan pangan dan stabilisasi harga pangan berperan penting dalam melindungi konsumsi rumah tangga miskin serta menekan dampak kemiskinan yang bersifat struktural. Penelitian empiris juga menunjukkan bahwa program bantuan sosial yang dirancang dan ditargetkan secara efektif dapat memperbaiki *food security* dan mengurangi risiko kemiskinan dalam jangka menengah, termasuk melalui instrumen bantuan pangan, dengan dampak positif pada stabilisasi konsumsi dan pengeluaran pangan (Anggara & Alfahma, 2025). Selain itu, World Bank (2022) menegaskan bahwa perlindungan sosial berbasis pangan menjadi instrumen penting untuk mencegah rumah tangga jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem, terutama pada kondisi krisis dan ketidakstabilan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan yang harus diambil adalah perlunya penyempurnaan basis data penerima manfaat secara berkala (updating DTKS) untuk meminimalkan *exclusion error*, sehingga bantuan pangan dapat menjangkau seluruh target sasaran secara tepat dan efektif menahan laju kemiskinan.

Pengaruh Rasio Belanja Bantuan Sosial terhadap Tingkat Kemiskinan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio Belanja Bantuan Sosial berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemiskinan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan alokasi belanja bantuan sosial cenderung searah dengan angka kemiskinan di suatu wilayah. Secara statistik, hubungan ini tidak menunjukkan bahwa bantuan sosial menyebabkan kemiskinan, melainkan mencerminkan respon kebijakan pemerintah yang bersifat reaktif terhadap kondisi sosial daerah. Temuan tersebut dapat dijelaskan melalui mekanisme *Targeted Social Spending*. Pemerintah daerah cenderung meningkatkan alokasi Belanja Bantuan Sosial ketika jumlah penduduk miskin di wilayahnya meningkat sebagai upaya mitigasi dampak ekonomi. Sejalan dengan argumen Ravallion (2016), bantuan sosial sering kali diarahkan secara spesifik pada kantong-kantong kemiskinan (*need-based targeting*), sehingga secara data keduanya bergerak secara simultan.

Dalam kerangka Amartya Sen, temuan ini menunjukkan bahwa bantuan sosial di Indonesia saat ini lebih berfungsi sebagai *Capability Protection* (pelindung kapabilitas) untuk menjaga agar masyarakat rentan tidak jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan akibat guncangan ekonomi (Barrientos, 2013). Namun, hubungan positif ini juga memberikan sinyal bahwa intervensi bantuan sosial belum sepenuhnya bertransformasi menjadi *Capability Expansion* (perluasan kapabilitas) yang mampu memandirikan masyarakat miskin secara permanen. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyeimbangkan antara bantuan konsumtif dengan program pemberdayaan yang mampu meningkatkan produktivitas masyarakat miskin agar mereka dapat keluar dari jerat kemiskinan secara mandiri.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kapasitas fiskal daerah dan modal manusia memegang peranan vital dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia melalui mekanisme perantara infrastruktur dan perlindungan sosial. Berlandaskan *Capability Approach*, hasil analisis SEM-PLS membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak hanya berkontribusi langsung terhadap penurunan kemiskinan, tetapi juga memperluas ruang fiskal bagi Rasio Belanja Bantuan Sosial dan distribusi pangan bagi masyarakat rentan. Di sisi lain, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) terbukti menjadi faktor kunci yang memungkinkan masyarakat memanfaatkan infrastruktur digital (Akses Internet) untuk kesejahteraan, meskipun temuan pada Akses Kesehatan (Puskesmas) menunjukkan adanya *endogenous program placement* di mana pembangunan Akses Kesehatan (Puskesmas) justru diprioritaskan pada wilayah-wilayah miskin sebagai bentuk intervensi afirmatif pemerintah.

Implikasi praktis dari penelitian ini menekankan perlunya transformasi strategi pengentasan kemiskinan dari pendekatan parsial menuju pendekatan yang lebih integratif. Pemerintah daerah disarankan untuk mengoptimalkan penggalian potensi PAD guna menjamin keberlanjutan pendanaan jaring pengaman sosial, mengingat bantuan sosial terbukti efektif sebagai penyangga daya beli masyarakat miskin. Selain itu, pembangunan infrastruktur fisik khususnya digital harus dibarengi dengan kebijakan peningkatan kualitas pendidikan agar masyarakat memiliki kapabilitas yang memadai untuk mengonversi akses teknologi menjadi peluang ekonomi produktif. Sinergi antara kebijakan fiskal, pembangunan manusia, dan penyediaan infrastruktur dasar menjadi prasyarat mutlak bagi terciptanya pembangunan yang inklusif.

Meskipun memberikan temuan empiris yang relevan, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan data makro tingkat provinsi dan indikator tunggal untuk setiap konstruk, sehingga belum sepenuhnya menangkap heterogenitas kualitas layanan publik serta dinamika kesejahteraan pada level mikro. Selain itu, penggunaan metode SEM-PLS lebih menekankan pada prediksi pola hubungan struktural dibandingkan pembuktian kausalitas yang kuat. Oleh karena itu, penelitian masa depan disarankan untuk memperluas unit analisis hingga tingkat kabupaten/kota atau rumah tangga dan mempertimbangkan penggunaan metode inferensi kausal seperti *Instrumental Variable (IV)* atau *Difference-in-Differences (DiD)* untuk memberikan bukti dampak kebijakan yang lebih presisi dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

Acharya, A., Vellakkal, S., Taylor, F., Masset, E., Satija, A., Burke, M., & Ebrahim, S. (2010). Impact of National-level or Social Health Insurance for the Poor and the Informal Sector: A Systematic Review for LMICs.

- Anggara, R. T., & Alfahma, E. G. (2025). Non-cash food assistance and household food security: Evidence from remote Indonesia. *Economic Journal of Emerging Markets*, 143–156.
- Angraeni, R. M., Khusaini, M., & Prasetyia, F. (2023). Fiscal Decentralization and its Effect on Poverty Alleviation: Case Study of Indonesia. *Bulletin of Islamic Economics*, 1(2), 35–48. <https://doi.org/10.14421/bie.2022.012-04>
- Aschauer, D. A. (1989). Is public expenditure productive? *Journal of Monetary Economics*, 23(2), 177–200.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Indonesia 2024 (Statistical Yearbook of Indonesia 2024)*. Badan Pusat Statistik.
- Barrientos, A. (2013). *Social assistance in developing countries*. Cambridge University Press.
- Bastagli, F., Hagen-Zanker, J., Harman, L., Barca, V., Sturge, G., Schmidt, & Pellerano, L. (2016). Cash transfers: what does the evidence say. *A Rigorous Review of Programme Impact and the Role of Design and Implementation Features*. London: ODI, 1(7), 1.
- Boadway, R., Shah, A., & Shah, A. (2024). Reflections on Emerging Roles of Intergovernmental Fiscal Transfers: From Financing to Accountability in Decentralized Subnational Governance, Preserving the Environment and Responding to Fiscal Shocks. *Preserving the Environment and Responding to Fiscal Shocks (November 06, 2024)*.
- Buchanan, J. M., & Tullock, G. (1965). *The calculus of consent: Logical foundations of constitutional democracy* (Vol. 100). University of Michigan press.
- Christiani, N. V., & Nainupu, A. E. (2021). Pengaruh Akses Terhadap Internet, Listrik dan PDRB Per Kapita Terhadap Tingkat Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2019. *JSTAR (Journal of Sustainable Tourism and Architecture Research)*, 1(1), 37–52.
- Churchill, S. A., & Smyth, R. (2021). Energy poverty and health: Panel data evidence from Australia. *Energy Economics*, 97, 105219.
- Deviyanti, R., Siregar, B., Biyanto, F., & Miswanto. (2025). Pengaruh dana desa, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap tingkat kemiskinan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 5(2), 711–722.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2024). *Data Realisasi APBD dan Pendapatan Daerah Provinsi 2018–2024*.
- Doytch, N., & Uctum, M. (2016). Globalization and the environmental impact of sectoral FDI. *Economic Systems*, 40(4), 582-594.
- Faguet, J. P., & Pöschl, C. (Eds). (2015). *Is decentralization good for development?: Perspectives from academics and policy makers*. Oxford University Press, USA.
- Fan, S., Zhang, L., & Zhang, X. (2002). *Growth, inequality, and poverty in rural China: The role of public investments* (Vol. 125). Intl Food Policy Res Inst.
- Galperin, H., & Fernanda Viacens, M. (2017). Connected for development? Theory and evidence about the impact of internet technologies on poverty alleviation. *Development Policy Review*, 35(3), 315–336.
- Hofmarcher, T. (2021). The effect of education on poverty: A European perspective. *Economics of Education Review*, 83, 102124.
- Hutton, G., & Chase, C. (2018). *Water supply, sanitation, and hygiene*.
- Jalan, J., & Ravallion, M. (2000). Is transient poverty different? Evidence for rural China. *Journal of Development Studies*, 36(6), 82–99.
- Kock, N. (2020). *WarpPLS user manual: Version 7.0*. ScriptWarp Systems.
- Langi, C. R., Zulfikar, A. L., Maulana, I., Widayati, N., & Yudaruddin, R. (2023). The impact of social aid on poverty during the COVID-19 pandemic. *Public and Municipal Finance*, 12(2), 104–116.
- Lewis, B. D. (2017). Local government spending and service delivery in Indonesia: the perverse effects of substantial fiscal resources. *Regional Studies*, 51(11), 1695–1707.
- Liu, G. G., Vortherms, S. A., & Hong, X. (2017). China's health reform update. *Annual Review of Public Health*, 38(1), 431–448.

- Lustig, N. (Ed.). (2018). *Commitment to equity handbook: Estimating the impact of fiscal policy on inequality and poverty*. Brookings Institution Press.
- Mahi, B. R. (2016). Indonesian decentralization: evaluation, recent movement and future perspectives. *Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB)*, 31(1), 119–133.
- Martinez-Vazquez, J., Lago-Peñas, S., & Sacchi, A. (2017). The impact of fiscal decentralization: A survey. *Journal of Economic Surveys*, 31(4), 1095–1129.
- Masaki, T., Ochoa, R. G., & Rodríguez-Castelán, C. (2020). *Broadband internet and household welfare in Senegal* (No. 13658). IZA Discussion Papers.
- Murshed, S. M., Bergougui, B., Badiuzzaman, M., & Pulok, M. H. (2022). Fiscal capacity, democratic institutions and social welfare outcomes in developing countries. *Defence and Peace Economics*, 33(3), 280–305.
- Musgrave, R. A. (1959). *The theory of public finance: A study in public economy*. (Vol. 658). New York: McGraw-Hill.
- Pick, J. B., & Sarkar, A. (2015). The global digital divide. In *The Global Digital Divides: Explaining Change* (Pp. 83-111). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- Popova, D. (2023). *Impact of equity in social protection spending on income poverty and inequality*. Social Indicators Research, 169(1), 697–721.
- Pramono, G. (2018). Availability of infrastructure for poverty reduction in Indonesia: Spatial panel data analysis. *Economics and Finance in Indonesia*, 64(2), 5.
- Prüss-Ustün, A., Wolf, J., Bartram, J., Clasen, T., Cumming, O., Freeman, M. C., . . . , & Johnston, R. (2019). Burden of disease from inadequate water, sanitation and hygiene for selected adverse health outcomes: an updated analysis with a focus on low-and middle-income countries. *International Journal of Hygiene and Environmental Health*, 222(5), 765–777.
- Psacharopoulos, G., & Patrinos, H. A. (2018). Returns to investment in education: a decennial review of the global literature. *Education Economics*, 26(5), 445–458.
- Ravallion, M. (2016). *The economics of poverty: History, measurement, and policy*. Oxford university press.
- Rosenzweig, M. R., & Wolpin, K. I. (1986). Evaluating the effects of optimally distributed public programs: Child health and family planning interventions. *The American Economic Review*, 76(3), 470–482.
- Schultz, T. W. (1980). The economics of being poor. *Bulletin of the Atomic Scientists*, 36(9), 32–37.
- Sen, A. (1985). *Commodities and Capabilities*. Amsterdam: North-Holland.
- Sen, A. (1992). *Inequality Reexamined*. Oxford: Oxford University Press.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford: Oxford University Press.
- Sholihin, M., & Ratmono, D. (2021). *Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 7.0 untuk hubungan nonlinier dalam penelitian sosial dan bisnis*. Penerbit Andi.
- Siburian, M. E. (2022). The link between fiscal decentralization and poverty—Evidence from Indonesia. *Journal of Asian Economics*, 81, 101493.
- Straub, S., Serebrisky, T., Bagnoli, L. S., & Rojas, C. (2025). Infrastructure and Poverty Reduction: Innovative Policies for Effective Access.
- Sumiyarti, S. (2022). Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan. *Srikandi: Journal of Islamic Economics and Banking*, 28–43.
- Timmer, C. P., Block, S., & Dawe, D. (2010). Long-run dynamics of rice consumption, 1960–2050. *Rice in the Global Economy: Strategic Research and Policy Issues for Food Security*, 139–174.
- UNDP. (2020). Human Development Report 2020: *The Next Frontier—Human Development and the Anthropocene*. New York: United Nations Development Programme.
- Van Deursen, A. J., & Van Dijk, J. A. (2019). The first-level digital divide shifts from inequalities in physical access to inequalities in material access. *New Media & Society*, 21(2), 354–375.

- World Bank. (2022). *Poverty and shared prosperity 2022: Correcting course*. The World Bank.
- Yushkov, A. (2015). Fiscal decentralization and regional economic growth: Theory, empirics, and the Russian experience. *Russian Journal of Economics*, 1(4), 404–418.
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPUJawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 222–243.

GAMBAR DAN TABEL

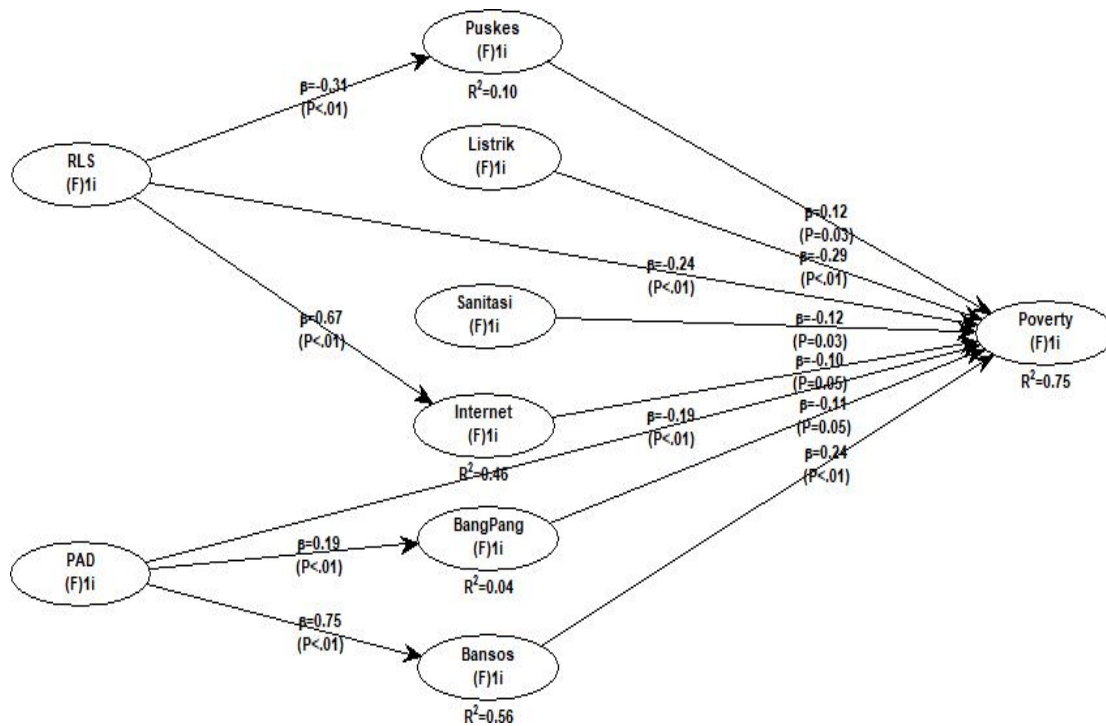
Tabel 1. Pengukuran Variabel dalam Penelitian

Jenis Variabel	Variabel	Definisi Operasional dan Pengukuran	Satuan
Eksogen	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Diukur sebagai logaritma natural (Ln) dari total Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh provinsi dari pajak, retribusi, dan sumber lain selain dana perimbangan untuk meminimalkan perbedaan skala nominal antar wilayah. PAD mencerminkan kapasitas fiskal daerah untuk membiayai pembangunan dan bantuan sosial	Ln (Rupiah)
	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Diukur sebagai rata-rata jumlah tahun pendidikan formal yang ditempuh penduduk berusia 25 tahun ke atas. Indikator ini mencerminkan kapabilitas sumber daya manusia yang dapat mendukung peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.	Tahun
	Akses Listrik	Diukur berdasarkan persentase rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan utama. Persentase dipilih untuk menunjukkan pemerataan akses listrik antarwilayah. Listrik merupakan infrastruktur fundamental yang meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup.	Persen (%)
Mediasi	Akses Sanitasi Layak	Diukur melalui persentase rumah tangga dengan fasilitas sanitasi yang memenuhi standar BPS. Sanitasi memengaruhi kesehatan masyarakat, dan persentase menunjukkan cakupan serta pemerataan layanan sanitasi di provinsi.	Persen (%)
	Akses Internet	Diukur berdasarkan persentase rumah tangga yang pernah mengakses internet dalam tiga bulan terakhir. Indikator ini mencerminkan inklusi digital yang mendukung pendidikan, pekerjaan, dan konektivitas, yang berdampak pada kemiskinan.	Persen (%)
	Akses Kesehatan (Puskesmas)	Diukur melalui jumlah puskesmas per 100.000 penduduk. Rasio ini memperhitungkan variasi jumlah penduduk antarprovinsi sehingga memberikan ukuran proporsional ketersediaan layanan kesehatan dasar. Akses kesehatan yang lebih baik mendukung kapabilitas masyarakat sesuai teori Amartya Sen.	Rasio (Unit/100.000 Penduduk)
	Rasio Belanja Bantuan Sosial	Diukur melalui rasio realisasi belanja bantuan sosial terhadap pagu anggaran bantuan sosial daerah. Rasio ini menilai efektivitas penyaluran bansos, yang memengaruhi kemampuan rumah tangga miskin memenuhi kebutuhan dasar.	Persen (%)
	Rasio KPM Bansos Pangan (BanPang)	Dihitung sebagai persentase keluarga penerima bantuan sosial pangan terhadap jumlah penduduk miskin. Rasio ini menunjukkan cakupan bantuan sosial, bukan sekadar jumlah penerima, sehingga menggambarkan ketepatan sasaran bansos.	Persen (%)

Endogen	Tingkat Kemiskinan	Variabel terikat dalam penelitian ini adalah tingkat kemiskinan, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk di masing-masing provinsi. Indikator ini merupakan ukuran resmi nasional untuk menggambarkan kondisi kemiskinan, sehingga relevan untuk analisis ekonomi regional.	Persen (%)
---------	--------------------	--	------------

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Akses Kesehatan (Puskesmas)	238	0.320	38.530	8.549	8.279
Akses Listrik (%)	238	65.900	100.000	98.091	4.418
Akses Sanitasi Layak (%)	238	33.750	97.120	79.294	11.044
Akses Internet (%)	238	29.500	98.180	78.711	13.265
Rasio KPM Bansos Pangan	238	0.090	7.320	2.156	1.677
Rasio Belanja Bantuan sosial	238	0.040	10.600	0.735	1.322
Tingkat Kemiskinan (%)	238	3.470	27.740	10.336	5.288
Rata Rata Lama Sekolah	238	6.520	11.490	8.733	0.935
Ln_Pendapatan Asli Daerah	238	26.432	31.558	28.524	1.161



Gambar 1. Hasil Analisis Jalur (Path Analysis)
Sumber: Output WarpPLS 7.0

Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis (Path Coefficient)

Jalur	Koefisien	P-Value	Hasil
PAD → Bansos	0,75	<0,01	Berpengaruh
PAD → BanPang	0,19	<0,01	Berpengaruh
PAD → Kemiskinan	-0,19	<0,01	Berpengaruh
RLS → Internet	0,67	<0,01	Berpengaruh
RLS → Puskesmas	-0,31	<0,01	Berpengaruh
RLS → Kemiskinan	-0,24	<0,01	Berpengaruh
Listrik → Kemiskinan	-0,29	<0,01	Berpengaruh
Sanitasi → Kemiskinan	-0,12	0,03	Berpengaruh

Internet → Kemiskinan	-0,10	0,05	Berpengaruh
Puskes → Kemiskinan	0,12	0,03	Berpengaruh
BanPang → Kemiskinan	-0,11	0,05	Berpengaruh
Bansos → Kemiskinan	0,24	<0,01	Berpengaruh

Sumber: *Output WarpPLS 7.0*

Tabel 4. Model Fit dan Quality Indices

Indikator	Nilai	Kriteria	Keterangan
APC	0,278	< 0,05	Signifikan
ARS	0,378	< 0,05	Signifikan
AARS	0,374	< 0,05	Signifikan
AVIF	2,684	≤ 3,3	Baik
AFVIF	2,197	≤ 3,3	Baik
GoF	0,615	≥ 0,36	Kuat

Sumber: *Output WarpPLS 7.0*

Tabel 5. Koefisien Determinasi (R²)

Variabel Endogen	R-Squared
Tingkat Kemiskinan	0,745
Rasio Belanja Bantuan Sosial	0,557
Akses Intenet	0,455
Akses Kesehatan (Puskesmas)	0,095
Rasio KPM Bansos Pangan	0,037

Sumber: *Output WarpPLS 7.0*